

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Faisal, S. H. (2014). *Memahami Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Supramono, G. (2014). *Hukum uang di Indonesia*. Gramata Publishing.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Pertama. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indonesia, B. (2004). *Bank Indonesia Bank Sentral Republik Indonesia: Sebuah Pengantar*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.
- Kusumah, M. W. & Baut, P. S. (1988). *Hukum, politik dan perubahan sosial*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Inodnesia.
- Manullang, E. F. M. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Penerbit Buku Kompas.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nubika, I. (2018). *Bitcoin: Mengenal Cara Baru Berinvestasi Generasi Milenial*. Bantul: Genesis Learning.
- Partamo, A.P. (1994). *Kamus Ilmiah Popular*. Surabaya: CV Arkola.

- Pohan, A. (2011). *Sistem Pembayaran: Strategi dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Raharjo, S., & Progresif, H. (2009). *Sebuah Seketsa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: GENTA Publishing.
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2017). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*. Depok: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Salman, O & Susanto, A.F. (2004) *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Selznick, P. (2001). *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. Transaction Publishers.
- Shidarta. (2013). *Pendekatan Hukum Progresif Dalam Mencairkan Kebekuan Produk Legislasi, dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Simorangkir, I. (Ed.). (2014). *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Snijders, A. (2004). *Antropologi Filsafat Manusia: Paradoks dan Seruan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soekanto, S & Mumadji S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sondakh, A. M. (2016). *Berburu Bitcoin*. Gramedia Widiasarana.
- Sunaryati, H. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni.
- Suteki, P., & Sosial, S. S. R. (2015). *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2006). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Surabaya: CV. Kita.

- Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wahab, S.A. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing
- Wijaya, D. A. (2016). *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency*. Puspantara.
- Wijaya, D.A. (2018). *Bitcoin Mining dan Cryptocurrency Lainnya*. Jakarta: Penerbit Jasakom.
- Wong, W. (2014). *Bitcoin*. Semarang: Indraprasta Media.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.

Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 20/4/DKom tentang Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency tanggal 13 Januari 2018.

PERATURAN NEGARA ASING

Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds, Act No. 22 of 2007, amended by Act No. 67 of 2017.

Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth) s 6.

Australian Taxation Office (ATO)'s Goods and Services Tax Ruling.

Financial Action Task Force, Juni 2015, Guidance for a Risk-Based Approach Virtual Currencies, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-RBA-Virtual-Currencies.pdf> pada 7 Juli 2021.

The Uniform Regulation of Virtual-Currency Businesses Act (URVCBA), Regulation of 2017.

Virtual Currency Act of 2017.

JURNAL

Dion, D. A. (2013). I'll gladly trade you two bits on Tuesday for a byte today: *Bitcoin*, regulating fraud in the e-economy of Hacker-cash. *U. Ill. JL Tech. & Pol'y*, 165.

- Gervais, A., Karame, G. O., Capkun, V., & Capkun, S. (2014). Is *Bitcoin* a decentralized currency? *IEEE security & privacy*, 12(3), 54-60.
- Hughes, S. D. (2017). *Cryptocurrency Regulations and Enforcement in the US*. *W. St. UL Rev.*, 45, 1;
- Iwashita, N. (2019). Regulation of crypto-asset exchanges and the necessity of international cooperation. *T20/TF2 Policy Brief*, March, 15, 2019.
- M. Guitián. (1998). *Central Banking in Theory and Practice* by Alan S. Blinder (Book Review). *Finance and Development*, 35(2), 52.
- Masakazu Masujima. Mori Hamada & Matsumoto. (2018). *Japan's Virtual Currency Regulation and its Recent Developments*.
- McBride, N. (2015). Payments and the concept of legal tender. *The Reserve Bank of New Zealand Bulletin*, 78(6), 3.
- Mohamed, H. (2020). Implementing a Central Bank Issued Digital Currency with Economic Implications Considerations. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 51-74.
- Nuryadi, H. D., & SH, M. (2016). Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 1(2), 394-408.
- Nurhadi, N. (2019). Teori Hukum Progresif Dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Perbankan Syariah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 154-167.
- Prayogo, T. (2018). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.
- Sulaiman, S. (2014). HUKUM RESPONSIF: HUKUM SEBAGAI INSTITUSI SOSIAL MELAYANI KEBUTUHAN SOSIAL DALAM MASA TRANSISI (Responsive Law: Law as a Social Institutions to Service of Social Need in Transition). *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 9(2), 199-205.
- Schmitz, S. W. (2006). The Political Economy of Institutional Change in the Payment System and Monetary Policy. Available at SSRN 944404.

Wantu, F. M. (2007). Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).

PENELITIAN

Allan, D. M. (2014). Submission of review in response to the: Statutory Review of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act (Cth) 2006.

Brito, J. (2013). Beyond Silk Road: potential risks, threats, and promises of virtual currencies. *Testimony before the Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, Mercatus Center at George Mason University, Arlington, VA.*

European Central Bank, October 2012, *Virtual Currency Schemes*, diakses dari <https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemes201210en.pdf> pada 7 Juli 2021.

Geme, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat (Woe) dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

Keuangan, T. P. A. D. R. (2010). Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Mahfud, M. M., Hartono, S., Sidharta, Tanya, B. L., & Susanto, A. F. (2013). *Dekonstruksi dan gerakan pemikiran hukum progresif*. Konsorsium Hukum Progresif, Universitas Diponegoro.

Lamandasa, R. F. (2011). *penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail* (Doctoral dissertation, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok).

Osumi, M., & de Taxis du Poët, P. (2018). EU-Japan Centre for Industrial Cooperation. *Impact*, 2018(11), 78-79.

Petrasic, K., & Bornfreund, M. (2016). Beyond *Bitcoin*: the blockchain revolution in financial services, White and Case report.

Treasury, A. (2014). Financial System Inquiry: Final Report. *December, Commonwealth of Australia, Canberra.*

KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Komoditas*, diakses pada 3 Desember 2020, dari <https://kbbi.web.id/komoditas>.

WEBSITE

Bank Indonesia, *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, diakses pada 15 Juni 2021 dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/blueprint-2025/default.aspx>.

Bank Indonesia, *Pengantar Stabilitas Sistem Keuangan*, diakses pada 23 Mei 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/ikhtisar/Default.aspx>.

Bank Indonesia, *Tujuan dan Tugas Bank Indonesia*, diakses pada 2 April 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/profil/Default.aspx>.

Bank Indonesia, *Sistem Pembayaran di Indonesia*, diakses pada 5 Desember 2020, dari <https://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>.

Bank of Japan. (2020). *The Release of "The Bank of Japan's Approach to Central Bank Digital Currency"*, diakses pada 16 Juni 2021, dari https://www.boj.or.jp/en/announcements/release_2020/rel201009e.htm/

Bisnis.com, (2021). *Bank Indonesia Tak Buru-Buru Rilis Mata Uang Digital Bank Sentral, Ini Sebabnya*, diakses pada 25 Mei 2021, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20210322/11/1370795/bi-tak-buru-buru-rilis-mata-uang-digital-bank-sentral-ini-sebabnya>.

Bitoc.to.com, April 2020, *Perkembangan Cryptocurrency di Indonesia Sangat Pesat*, diakses dari <https://bitoc.to.com/perkembangan-Cryptocurrency-di-indonesia-sangat-pesat/> pada 15 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

CNBC.com. (2021). *Ikuti China, BI akan Terbitkan Rupiah Digital! Ini 3 Modelnya*, diakses pada 8 April 2021, dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210225153032-37-226164/ikuti-china-bi-akan-terbitkan-rupiah-digital-ini-3-modelnya/1>.

- CNBC.com. (2021). *Ini Tiga Pertimbangan BI Bakal Terbitkan Uang Digital*, diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210531074114-37-249404/ini-tiga-pertimbangan-bi-bakal-terbitkan-uang-digital>.
- Committee on Payment Market Infrastructures (CPMI). (2018). *Central Bank Digital Currencies*, diakses pada 25 Juni 2021 dari <https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf>.
- Complyadvantage.com. (2020). *Cryptocurrency Regulations in Australia*, diakses pada 12 Juni 2021, dari <https://complyadvantage.com/knowledgebase/cryptocurrency-regulations/Cryptocurrency-regulations-australia/>
- Databoks.katadata.co.id. (2019). *10% Orang Indonesia Punya Mata Uang Kripto*, diakses pada 9 Oktober 2020, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/11/28/10-orang-indonesia-punya-mata-uang-kripto>.
- Detik.com. (2017). *Nilainya Tembus Rp 60 Juta, Apa Benar Bitcoin Menguntungkan?* Diakses pada 7 Mei 2021, dari <https://finance.detik.com/moneter/d-3637100/nilainya-tembus-rp-60-juta-apa-benar-bitcoin-menguntungkan>.
- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional Bank Indonesia, *Instrumen Pembayaran*, diakses pada 3 Desember 2020, dari <https://www.bi.go.id/en/sistem-pembayaran/edukasi/Documents/7bb2ae019b024029b37c34b720412a49PengantarInstrumenPembayaran.pdf>.
- Financial Action Task Force, *Virtual Currencies: Key Definitions and Potential AML/CFT Risks*, diakses pada 11 Mei 2021, dari <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf>.
- Financial Services Agency of Japan. (2017). *Details of Screening for New Registration Application as Virtual Currency Exchange Service Provider*, diakses pada 11 Juni 2021 dari [02.pdf \(fsa.go.jp\)](https://www.fsa.go.jp).

Financial Services Agency of Japan. (2019), diakses pada 11 Juni 2021 dari [kasoutuka.pdf \(fsa.go.jp\)](#).

Global Legal Insights. (2021). *Blockchain & Cryptocurrency Regulation 2021*, diakses pada 12 Juni 2021, dari <https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/blockchain-laws-and-regulations/australia>.

Merriam-Webster. (2009). *Cryptocurrency*, diakses pada 4 Desember 2020 dari <https://www.merriam-webster.com/dictionary/Cryptocurrency>.

Otoritas Jasa Keuangan, FAQ Otoritas Jasa Keuangan, diakses pada 4 Desember 2020, dari [https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan](https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20adalah,modal%2C%20dan%20sektor%20jasa%20keuangan).

The Japan Times. (2018). Cryptoprofits are Taxable — Have you Filed? Diakses pada 11 Juni 2021 dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2018/02/18/business/financial-markets/cryptoprofits-taxable-filed/#.W59uAy2B3OQ>.

So Saito, So Law Office. (2018). *Role of Crypto-currency Exchange and Japanese VC Act*, diakses pada 11 Juni 2021 dari [so-law.jp](#).

Sygnia.io, (2021). *Guide: japan Crypto Asset Regulation*, diakses pada 3 Mei 2021 dari <https://www.sygnia.io/blog/japan-crypto-asset-regulation-guide/>

The Commodities Futures Trading Commission United States of America, *Basic of Future Trading*, diakses pada 3 Desember 2020, dari <https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/FuturesMarketBasics/index.htm>.